



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS KEHUTANAN

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Rajabasa Telp. (0721) 703177 Fax. 705058

BANDAR LAMPUNG 35144

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : SK. 08 /V.24/S.3/2022

TENTANG

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi pencapaian target kinerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2021-2024;
 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022 terdiri:
- a. Sasaran Strategis Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2021-2024;
 - b. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KETIGA : Rencana Aksi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, memuat Aksi atau Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, Output atau Keluaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG,**



Ir. Y. RUCHYANSYAH, M.Si
* Pembina Utama Muda
NIP. 19680508 200003 1 006

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/TW	PROGRAM						KEGIATAN/SUB KEGIATAN						RENCANA AKSI		JADWAL PELAKUAN											
				SASARAN PROGRAM			INDIKATOR PROGRAM			NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN		TW		TARGET/TW		AKSI KEGIATAN		TW							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
1														Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan kayu	Jumlah Produksi hasil hutan kayu													
														Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksanaanya Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1	1	Dokumen		1. Penyusunan Dokumen Monitoring dan Pembinaan IUPHHK Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		✓	✓					
																	2	-	Dokumen										
																	3	1	Dokumen										
																	4	-	Dokumen										
														Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksanaanya Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasi Hutan Kayu Skala dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1	1	-	Dokumen	1. Fasilitasi Kepengurusan IUPHHK Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								
																	2	-	Dokumen										
																	3	-	Dokumen										
																	4	1	Dokumen										
														Perbenihan Tanaman Hutan	Meningkatnya jumlah Pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perbenihan tanaman Hutan		6	Dokumen											
														Penelitian Pengadilan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdarar	Terlaksanaanya Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Kegiatan Usaha Pengadilan dan Pengedar Benih, Kegiatan Usaha Pengadilan dan Pengedar Benih Serta Kegiatan Usaha Pengadilan dan Pengedar Benih dan Bibit bagi Pelaku Usaha Pengadilan dan Pengedar Benih dan Bibit Dalam Provinsi Perhutani	Jumlah Penelitian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadilan dan Pengedar Benih, Pengadilan dan Pengedar Benih, Serta Pengadilan dan Pengedar Benih dan Bibit Dalam Provinsi Perhutani	1	1	unit usaha		1. Penerbitan Perizinan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Tanaman Hutan Terdarar		✓	✓					
																	2	0	unit usaha										
																	3	2	unit usaha										
																	4	1	unit usaha										
														Sertifikasi Sumber Benih	Terlaksanaanya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	1	-	Sertifikat	1. Monitoring Survey SBB/Calon SBB	✓	✓	✓	✓					
																	2	-	Sertifikat										
																	3	-	Sertifikat										
																	4	12	Sertifikat										

NO	SASARAN			PROGRAM								KEGIATAN/SUB KEGIATAN								RENCANA AKSI						
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/TW	PROGRAM	TW	INDIKATOR PROGRAM	TW	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/TW		AKSI KEGIATAN	TW	TW	TW	TW							
									NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET/TW			16	17	18	1	2	Laporan Operasi	1. Pelaksanaan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	✓	✓	✓	✓			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15															
												Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksanaanya Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1	2	-	Laporan Operasi	1. Pelaksanaan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	✓	✓	✓	✓			
												Pengawalian Tumbuhan, Satwa serta Habitat TAHURA Provinsi	Terlaksanaanya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA yang Dilinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	1	0.4	Ha	Ha	1. Pengawalian Tumbuhan, Satwa, serta Habitat Penangkaran Rusa	✓	✓	✓	✓			
												Pemulihian Ekosistem atau Perutusan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Terlaksanaanya Pemulihan Ecosystem TAHURA Provinsi	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ecosystem	2	0.48	Ha	Ha	1. Pembangunan Pusat Inkubasi Koleksi Tanaman Nusantara	✓	✓	✓	✓			
												Perenfaktan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksanaanya Pelayanan Permafaatan Hutan di TAHURA Provinsi	Jumlah Permohtoran Pelayanan Permafaatan di TAHURA yang Dilindakanjuti	3	0.48	Ha	Ha	1. Fasilitasi dan/atau Monitoring Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	✓	✓	✓	✓			
												Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	Terlaksanaanya Penyelenggara TAHURA Provinsi	Kerja Sama	Jumlah Perjalinan Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi	1	-	Ha	Ha	1. Fasilitasi dan/atau Monitoring Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	✓	✓	✓	✓		
												Pengiatian Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanaanya Pengulangan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1	-	Dokumen	Dokumen	1. Penguratan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA	✓	✓	✓	✓			
												Penercanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksanaanya Kegiatan Perencanaan TAHURA Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang	1	-	Dokumen	Dokumen	1. Pengusulan Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA Jangka Panjang dan Pendek	✓	✓	✓	✓			
												Penlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Tersedianya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar	persentase perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar					90% / tahun							
												Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksanaanya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1	-	Laporan	Laporan	1. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	✓	✓	✓	✓			
												Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Terlaksanaanya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Perseentase kegiatan pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola	1	-	Laporan	Laporan	90% / tahun							
												Pengujian Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksanaanya Pengujian Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	1	30	Orang	Orang	1. Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan	✓	✓	✓	✓			

NO	SASARAN			PROGRAM						KEGIATAN/SUB KEGIATAN						RENCANA AKSI			JADWAL PELAKUAN		
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/TW	AKSI KEGIATAN	TW	TW	TW	TW			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	paket	1. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas Kehutanan dan KPH	✓	✓	✓	✓		
									Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	3	paket	1. Pengadaan Bahan/Material untuk Dinas Kehutanan dan KPH	✓	✓	✓	✓		
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Teriksannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	4	paket	1. Penyusunan Laporan Fasilitasi Makan Minum Tamu/Rapat untuk Dinas Kehutanan dan KPH	✓	✓	✓	✓		
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Teriksannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	3	Laporan	1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk Dinas Kehutanan dan KPH	✓	✓	✓	✓		
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Teriksannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	3	Laporan	1. Penyusunan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	✓	✓	✓	✓		
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teriksannya pengadaan barang milik OPD	Jumlah pengadaan barang milik daerah	5	Unit		1. Penyusunan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	✓	✓	✓	✓		
									Pengadaan Mebel	Tersedianya Mbel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	-	paket	1. Pengadaan Mebel untuk OPD	✓	✓	✓	✓		
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	1	paket	1. Pengadaan Mebel untuk OPD	✓	✓	✓	✓		
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	Unit	1. Pengadaan Mebel untuk OPD	✓	✓	✓	✓		
									Penyediaan Jasa Penurjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penurjang Urusan dinas kehutanan	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penurjang Urusan dinas kehutanan	12 bulan			1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	✓	✓	✓	✓		
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	3	Laporan	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik untuk Dinas Kehutanan dan KPH	✓	✓	✓	✓		
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	3	Laporan	1. Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Dinas Kehutanan dan KPH	✓	✓	✓	✓		

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			RENCANA AKSI			JADWAL PELAKUANAN					
		INDIKATOR KINERJA	TW	TARGET/TW	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TW	NAMA KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TW	TARGET/TW	AKSI KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penelitian dan Daerah	Terpeliharaanya barang milik dinas kelutuhan	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik dinas kelutuhan	12 bulan							
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	50	unit	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	✓	✓	✓	✓
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penitinya	1	50	unit	1. Penyediaan Pajak Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	✓	✓	✓	✓
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	65	unit	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan peralatan Kantor untuk Dinas Kerujanan dan KPH	✓	✓	✓	✓
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	4	6	-	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung untuk Dinas Kerujanan dan KPH	✓	✓	✓	✓



KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG

Ir. Y. RUCHYANSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19680508 200003 1 006